

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PESTISIDA BERLABEL PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 448/Pid.Sus/2021/ PN Jmb)

Oleh :

Farhan Ekayura Dananjaya

E1A018239

Meningkatnya keberhasilan Program Ketahanan Pangan serta produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pestisida di tingkat petani karena pestisida merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usahatani. Kondisi tersebut dianggap sebagian orang sebagai peluang usaha sehingga banyak pihak yang membuka kegiatan usaha dagang pestisida untuk meraup keuntungan. Pembelian pestisida tidak jarang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen karena adanya perbuatan itikad tidak baik dari oknum pelaku usaha pestisida.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel, jurnal dan dokumen resmi dengan cara studi Pustaka, dan metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode analisis normative kualitatif.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum menyatakan bahwa Jamaluddin selaku pelaku usaha Pestisida telah bersalah karena melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun hakim kurang mempertimbangkan pelaku usaha juga melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pestisida, Label Palsu

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF PESTICIDE CONSUMERS LABELED FAKE
BASED ON LAW NUMBER 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER
PROTECTION**

(STUDY OF DECISION NUMBER 448/Pid.Sus/2021/ PN Jmb)

By :

Farhan Ekayura Dananjaya

E1A018239

The increase of Agricultural Productivity and the success rate of Food Security Program are undeniably correlated with the availability of the infrastructure and means of production, especially pesticides because it is one of the primary means of production. This, in turn created a huge business opportunity that resulted in an influx of pesticide Business Actors in search of profits. This inevitably cause losses to customers because some of the Business Actors done unscrupulous actions on their dealings in the name for greater profits for them.

The method used for this thesis is a juridical normative approach. The data that was used is secondary data in the form of laws and regulations, literary books, articles, journals, and formal documents utilizing the means of library research. The data analysis method that was utilized is normative qualitative analytical method.

The thesis then can be concluded that consumers have indeed received legal protection. Therefore, it can be declared that Jamaluddin as a Pesticide Business Actor is guilty of violating the provisions of Article 8 section (1) letter f of Law Number 8 dated 1999 concerning Consumer Protection even though the judge had a rather disregarding attitude towards the fact that the business actor is also violating the provisions of Article 60 Section 1 letter g Law Number 12 of 1992 concerning Plant Cultivation System.

Keywords : *Legal protection, Consumers, Pesticide, Fake Label*